



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DISPERINDAGKOP & UKM TAHUN 2019

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM**

**Jl. SENGKAWIT RAYA KOMPLEK PASAR INDUK
TANJUNG SELOR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ALLAH.S.W.T atas segala rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKjIP) ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat didalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, yang nantinya akan dijadikan bahan pendukung dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKjIP) Provinsi Kalimantan Utara. Semoga Bermanfaat dan dapat memenuhi apa yang dibutuhkan.

Tanjung Selor, 06 Januari 2020
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara



Drs. Hartono, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196105071985031014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum SKPD	1
B. Tujuan dan Fungsi.....	1
C. Sumber Daya Organisasi.....	2
D. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Strategi dan Kebijakan	9
B. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Akuntabilitas Kinerja	13
B. Analisis Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Terkait Pencapaian Yang Ada Di PK.....	15
C. Pengungkapan Renstra Yang Belum Dapat Diukur Di Tahun 2019	16
BAB IV PENUTUP	30
A. Kesimpulan	30
B. Hasil Analisis Berupa Hambatan dari Bab III Sasaran.....	31
C. Langkah-langkah Yang Akan Dilakukan Di Tahun Berikutnya Untuk Mengatasi Hambatan.....	32
D. Pengungkapan Renstra Baru Dengan Menyusun Perjanjian Kinerja Baru Yang Sesuai Dengan Renstra.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Per Desember Tahun 2019	3
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Tidak Tetap Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Per Desember Tahun 2019	3
Tabel 1.3	Data Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat/Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan Pegawai per Desember 2019	4
Tabel 1.4	Data Pegawai Negeri Sipil Menurut Bidang Pendidikan dan Jenis Kelamin Disperindagkop & UKM Prov. Kaltara Per Desember 2019	4
Tabel 1.5	Pegawai Tidak Tetap menurut Pendidikan dan jenis kelamin di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.....	5
Tabel 1.6	Data Pendidikan Pegawai Tidak Tetap Menurut Jenis Kelamin Disperindagkop & UKM Prov. Kaltara Per Desember 2019	5
Tabel 2.1	Strategi dan Kebijakan.....	9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja dan Target	12
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Berdasarkan IKU Disperindagkop dan UKM Tahun 2019 ...	13
Tabel 3.2	Hambatan dan Upaya yang dilakukan terkait pencapaian yang ada di PK	15
Tabel 3.3	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	17
Tabel 3.4	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 2018-2019.....	18
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan Dengan Target Renstra	19
Tabel 3.6	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan	24
Tabel 4.1	Analisis Hambatan.....	31
Tabel 4.2	Hambatan dan Upaya dilakukan tahun berikutnya.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum SKPD

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dasar pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Kalimantan Utara.

B. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 79 dan 80 Paragraf 2 dan 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumus kebijakan teknis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah;

- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Perindustrian;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perizinan Industri;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sistem Informasi Industri;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sarana Distribusi Perdagangan;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengembangan Ekspor;
- i. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis
- l. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C. Sumberdaya Organisasi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan akhir Desember tahun 2019 memiliki jumlah pegawai Negeri Sipil Sebanyak 57 orang dan Pegawai Tidak Tetap Sebanyak 21 Orang berikut ini disajikan Jumlah pegawai Negeri dan Tenaga kontrak Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM

Table 1.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Per Desember Tahun 2019

No.	Bagian / Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Sekretariat	5	12	17
2.	Bidang Industri	4	4	8
3.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	4	6	10
4.	Bidang Perdagangan Luar Negeri	8	1	9
5.	Bidang Koperasi & UKM	10	3	13
J u m l a h		31	26	57

Berikut disajikan Jumlah pegawai Tidak Tetap sesuai dengan jenis kelamin dan masing – masing bidang.

Table 1.2. Jumlah Pegawai Tidak Tetap Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Per Desember Tahun 2019

No.	Bagian / Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Sekretariat	9	8	17
2.	Bidang Industri	1	1	2
3.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	1	-	1
4.	Bidang Perdagangan Luar Negeri	-	-	-
5.	Bidang Koperasi & UKM	1	-	1
J u m l a h		12	9	21

Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara didukung oleh 3 Orang dengan Pendidikan S2, 47 Orang S1, 3 Orang D3, 4 Orang SLTA dan didukung oleh 9 Orang S1, 1 Orang D3, 11 Orang SMA Tenaga Kontrak.

Berikut disajikan Tabel Pangkat/Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil per Desember 2019.

Tabel 1.3 Data Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat/Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan Pegawai per Desember 2019

Pangkat/Gol. Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD	
9	43	5	-	31	26	3	47	3	4	-	0	

Berikut tabel Pegawai Negeri Sipil menurut pendidikan dan jenis kelamin di Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM

Table 1.4. Data Pegawai Negeri Sipil Menurut Bidang Pendidikan Dan Jenis Kelamin Disperindagkop & UKM Prov. Kaltara Per Desember 2019

No.	Bagian / Bidang	PENDIDIKAN												Jumlah	
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat					1	1	1	3	2	7	1	1	5	12
2.	Bidang Industri					-	-	-	-	4	4	-	-	4	4
3.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri					1	-	-	-	3	4	-	2	4	6
4	Bidang Perdagangan Luar Negeri					-	-	-	-	8	1	1	-	8	1
5.	Bidang Koperasi & UKM					-	-	-	-	9	3	1	-	10	3
J U M L A H														31	26

Berikut ini disajikan tabel Tenaga Kontrak menurut pendidikan dan jenis kelamin di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Tabel 1.5 Pegawai Tidak Tetap menurut pendidikan dan jenis kelamin di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai Kontrak
L	P	S2	S1	SM/D3	SMA / SMK	SLTP	SD	
12	9	0	8	2	11	0	0	21

Berikut disajikan tabel Pendidikan Pegawai Tidak Tetap menurut jenis kelamin

Tabel 1.6. Data Pendidikan Pegawai Tidak Tetap Menurut Jenis Kelamin Disperindagkop & UKM Prov. Kaltara Per Desember 2019

No.	Bagian / Bidang	PENDIDIKAN												Jumlah	
		SD		SLTP		SMA/ SMK		D3		S1		S2			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	0	0	0	0	7	4	0	1	2	4	0	0	9	9
2.	Bidang Industri	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
3.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4.	Bidang Perdagangan Luar Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Bidang Koperasi & UKM	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Jumlah														12	9

D. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi

Dalam penentuan isu strategis perlu dilakukannya identifikasi terhadap permasalahan yang ada di Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara berikut permasalahan yang terdapat di bidang :

a. Permasalahan bidang Perindustrian

- Ketatnya tingkat persaingan pasar.
- Tingginya cost Produksi.
- Masih rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk.
- Produk-produk yang diproduksi oleh pelaku usaha Kalimantan Utara tidak cukup baik untuk bersaing di pasaran nasional maupun internasional
- Masih rendahnya kompetensi pelaku IKM.
- Belum terpromosikannya produk IKM dengan baik.
- Perizinan (sertifikasi) yang terlalu panjang dan cukup lama dan berpengaruh pada produktifitas Pelaku IKM.

b. Permasalahan bidang Perdagangan

Beberapa permasalahan terkait dengan urusan perdagangan antara lain adalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri
 - Minimnya pengetahuan pelaku usaha dalam peningkatan dan pengembangan produk-produknya dan mekanisme dalam melakukan kegiatan ekspor/impor.
 - Kesadaran pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk masih tergolong rendah.
 - Jaringan distribusi yang sulit dikarenakan minimnya infrastruktur penunjang sehingga meningkatkan cost produk-produk yang digunakan di daerah Kaltara sendiri maupun produk yang ditawarkan ke pasar nasional maupun internasional.
 - Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melindungi hak-hak konsumen.
 - Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan.
 - Belum terpromosikannya produk pelaku usaha dengan baik.
-

c. Permasalahan Bidang Koperasi dan UKM

Beberapa permasalahan yang terkait dengan urusan Koperasi dan UKM antara lain adalah sebagai berikut :

- Rendahnya tingkat kemampuan SDM dalam mengelola koperasi.
- Meningkatnya koperasi tidak aktif.
- Masih rendahnya kompetensi pelaku UKM dan UKM.
- Rendahnya tingkat kewirausahaan pengelola UKM.
- Fasilitas untuk promosi produk UKM sangat terbatas.
- Pemahaman yang masih kurang untuk (Managerial) pengetahuan aliran keuangan usaha yang menunjang perhitungan laba dan rugi usaha UKM.
- Lemahnya strategi untuk mencapai kesuksesan sebuah UKM/Koperasi.
- Sulitnya pemasaran produk UKM.

Selain permasalahan yang terdapat dibidang, terdapat juga permasalahan lain sebagai berikut :

- Kurang memadainya Sumber Daya Manusia pegawai dari segi kualitas maupun kuantitas.
- Kurang memadainya sarana/prasarana penunjang.

E. Sistematika Penulisan

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara terdiri dari 4 (Empat) bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan mencakup : Gambaran Umum SKPD, Tugas dan Fungsi, Sumberdaya Organisasi, Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi dan Sistematika penyajian Laporan Kinerja.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Bab ini mencakup Perencanaan Kinerja mencakup : Strategi dan Kebijakan Perjanjian Kinerja.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Bab ini mencakup : Akuntabilitas kinerja, capaian-capaian di perjanjian Kinerja, analisis hambatan dan upaya yang sudah dilakukan terkait pencapaian yang ada di perjanjian kinerja, pengungkapan renstra baru yang belum dapat diukur di tahun 2016.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Jika Ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan apapun kegagalan pernyataan kinerja;

Bab IV : Penutup

Bab ini mencakup : Kesimpulan, hasil analisis berupa hambatan dari bab III sasaran, langkah-langkah yang dilakukan ditahun berikutnya untuk mengatasi hambatan, pengungkapan Renstra baru dengan menyusun perjanjian kinerja baru yang sesuai dengan renstra;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Strategi Dan Kebijakan

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Rencana Strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

Table 2.1. Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pertumbuhan sektor industri	Meningkatnya Daya Saing Industri	Peningkatan industri yang berdaya saing tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan teknologi pengembangan ekonomi yang berdaya saing 2. Menciptakan produk layak jual dan memenuhi standar 3. Menciptakan industri kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal 4. Meningkatkan sarana penunjang industri

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan dalam negeri	Meningkatnya perdagangan lokal yang optimal	Efisiensi perdagangan dalam negeri dan Peningkatan tertib perdagangan.	Mewujudkan perdagangan lokal yang optimal
			Peningkatan Pertumbuhan Pelaku Ekspor	1. Penyediaan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri 2. Membentuk Asosiasi Eksortir 3. Mengembangkan Kluster Produk Ekspor 4. Membangun Promosi Perdagangan Internasional 5. Membangun Hubungan Kerja sama dengan Negara lain 6. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha
		Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	pembinaan dan pengawasan aktivitas perdagangan	1. Peningkatan pengawasan barang beredar
3	Meningkatkan pertumbuhan koperasi dan UKM berkualitas	Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan UKM sehat	Pengembangan kelembagaan usaha Koperasi dan UKM yang berdaya saing tinggi.	1. Meningkatkan Kapasitas kopetensi pelaku Koperasi dan UKM

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				2. Melaksanakan Sosialisasi tentang perkoperasian dan UKM 3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan generasi muda melalui pelatihan kewirausahaan 4. Menyelenggarakan Promosi Produk UKM dan UKM 5. Meningkatkan pengawasan terhadap koperasi

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Merupakan Perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak dimana pihak pertama adalah Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dan Pihak ke dua adalah Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Ir. Irianto Lambrie, M.M sebagai acuan kerja Dinas Perindagkop dan UKM pada Tahun Anggaran 2019 dan mempertanggungjawabkan dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Table 2.2 Perjanian Kinerja dan target

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Daya Saing Industri	1. Nilai Produksi IKM	900 M
		2. Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	2,7%
2	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	2,5%
		Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor	2%
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	40%
3	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	1. Persentase UKM Produktif	27%
		2. Persentase Koperasi Sehat	18%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian – capaian di perjanjian kinerja

Capaian indikator pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan UKM tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai produksi IKM.
2. Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB.
3. Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.
4. Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor.
5. Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi.
6. Persentase UKM Produktif.
7. Persentase Koperasi Sehat.

***Tabel 3.1 Capaian Kinerja Berdasarkan IKU Disperindagkop dan UKM
Tahun 2019***

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya daya saing industri	Nilai Produksi IKM	900 M	900 M
		Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	2,7%	0%
2.	Meningkatnya Daya saing Perdagangan	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	2,5%	0%

		Persentase pertumbuhan pelaku ekspor	2%	16,67%
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	40%	61.60%
3.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	Persentase UKM Produktif	27%	33%
		Persentase Koperasi Sehat	18%	97 Koperasi 21.23%

Catatan :

- 1 Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB dan Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB masih 0% karena untuk data 2019 belum dirilis oleh BPS.
- 2 Jumlah Pelaku Ekspor pada tahun 2018 sebanyak 30 Pelaku Ekspor, pada tahun 2019 meningkat menjadi 35 Pelaku Ekspor.
- 3 97 Koperasi dari 457 koperasi aktif sekaltara yang telah memiliki NIK dan sertifikat NIK Koperasi yang telah diterbitkan oleh Kementrian Koperasi dan UKM tahun 2019
- 4 Jumlah UMKM pada tahun 2019 sebanyak 12.506 UMKM
- 5 Sumber Data : Masing – Masing Bidang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara.

B. Analisis Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Terkait Pencapaian Yang Ada Di PK

Bagian ini akan menguraikan analisis hambatan dan upaya yang dilakukan terkait pencapaian yang ada di PK, dengan melakukan analisa terhadap permasalahan – permasalahan yang dapat menghambat pencapaian, kinerja yang telah diperjanjikan sebagaimana Perjanjian Kinerja 2019 antara Kepala Daerah dan Kepala OPD, dan hambatan serta upaya yang dilakukan terkait penapaian Perjanjian Kinerja terangkum dalam table berikut :

Tabel 3.2
Hambatan dan Upaya yang dilakukan terkait pencapaian yang ada di PK

No	Sasaran Strategis	Hambatan	Upaya yang dilakukan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Daya Saing Industri	Masih terdapat IKM yang belum memenuhi standarisasi produk sehingga masih kalah bersaing dalam penjualanya	Dialkukannya sosialisasi dan pelatihan tentang pengolahan produk menggunakan teknologi.
2	Meningkatnya Daya saing Perdagangan	Masih banyaknya pelaku usaha yang belum berorientasi ekspor	Dilakukan Sosialisasi kepada pelaku eskpor dan melakukan promosi terhadap produk lokal ke pasar internasional
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Masih banyak pelaku usaha yang belum sadar akan pentingnya melindungi hak – hak konsumen	Dilakukan Pengawasan Barang beredar dan Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk melindungi hak-hak konsumen.

3	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	1. Masih banyaknya pelaku UKM yang belum memahami mengenai manajemen keuangan sehingga mereka lebih rentan untuk mengalami kebangkrutan	1. Telah dilakukan pendampingan melalui kegiatan pendampingan koperasi dan UKM yang bersumber dari dana DAK Kementerian Koperasi dan UMKM
		2. Masih terdapat koperasi yang tidak melaksanakan kegiatan RAT, belum memiliki NIK dan Sertifikat NIK dari Kementrian Koperasi dan UKM dan terdapat koperasi yang belum memenuhi aspek organisasi, aspek usaha, aspek keuangan, aspek sosial dan aspek sumber daya manusia sehingga belum memenuhi kategori koperasi sehat.	2. Telah dilakukan pembinaan koperasi dan dilakukan monitoring kepada koperasi untuk dievaluasi, dan sebagai menambah minat koperasi untuk meningkatkan status koperasi yang dijalankan dilakukan pemberian penghargaan koperasi berprestasi dalam upaya untuk memacu koperasi menjad lebih baik lagi.

C. Pengungkapan Renstra Yang Belum Dapat Diukur Di Tahun 2019

Dalam Pengungkapan renstra baru yang belum dapat diukur di tahun 2019, tidak terdapat indikator program dan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak memiliki relevansi, antara indikator dan satuan yang terdapat dalam Program maupun Kegiatan yang terdapat dalam renstra 2016-2021.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, telah ditetapkan target dalam pelaksanaan kinerja tahun 2019 dan dapat dilihat pula perbandingan antara Target yang telah ditetapkan dan Realisasi Kinerja yang telah dicapai antara lain adalah;

Tabel 3.3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya daya saing industri	Nilai Produksi IKM	900 M	900 M
		Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	2,7%	0%
2.	Meningkatnya Daya saing Perdagangan	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	2,5%	0%
		Persentase pertumbuhan pelaku ekspor	2%	16,67%
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	40%	61.60%
3.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	Persentase UKM Produktif	27%	33%
		Persentase Koperasi Sehat	18%	97 Koperasi 21.23%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Dalam realisasi serta capaian kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 terdapat perbandingan dengan tahun sebelumnya, diantaranya adalah perbedaan dari target sasaran dan indikatornya sehingga menyebabkan perbedaan dalam realisasi kinerja dan capaian kinerja antara tahun 2016 dan 2019 hal ini dikarenakan telah dilakukan revisi terhadap Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindagkop dan UKM, Maka dari itu tidak dapat dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dikarenakan perbedaan sasaran strategis dan indikator capaian.

Tabel 3.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 2018-2019

No	Sasaran Strategis 2018	Indikator Kinerja 2018	Capaian Kinerja	Sasaran Strategis 2019	Indikator Kinerja 2019	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya daya saing industri	Nilai Produksi IKM	890M	Meningkatnya daya saing industri	Nilai Produksi IKM	900 M
		Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	9,43%		Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	0%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	11,63%	Meningkatnya Daya saing Perdagangan	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	0%
			12%		Persentase pertumbuhan pelaku ekspor	16,67%

	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/ barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	11%	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/ barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	61.60%
4	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	Persentase UKM Produktif	24%	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	Persentase UKM Produktif	33%
		Persentase Koperasi Sehat	26%		Persentase Koperasi Sehat	97 Koperasi 21.23%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Pada bagian ini dilakukan perbandingan antara realialisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra antara lain seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan Dengan Target Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Pencapaian Target	Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Meningkatnya daya saing industri	Nilai Produksi IKM	900 M	900 M	1 T
		Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	2,7%	0%	3%
2.	Meningkatnya Daya saing Perdagangan	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	2,5%	0%	2,5%

		Persentase pertumbuhan pelaku ekspor	2%	16,67%	2%
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	40%	61.60%	25%
3.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	Persentase UKM Produktif	27%	33%	30%
		Persentase Koperasi Sehat	18%	97 Koperasi 21.23%	25%

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional

Pada bagian ini tidak dapat dilakukan perbandingan dikarenakan tidak terdapat standar nasional pada urusan Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, maka ditemui beberapa Penyebab Keberhasilan dan permasalahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

Keberhasilan :

- a. Dinas Perindagkop dan UKM melalui Bidang Koperasi dan UKM dapat melakukan kegiatan pendampingan kepada Koperasi guna meningkatkan kemampuan dari pada koperasi itu sendiri agar koperasi tersebut dapat menjadi koperasi yang dapat memberikan manfaat kepada anggota dan lingkungan dimana koperasi tersebut didirikan, selain itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melalui Bidang Koperasi memberikan

pelatihan dalam kemampuan membatik, menganyam, menjahit, membuat olahan pangan serta pelatihan keterampilan salon untuk membantu pelaku UKM lebih berdaya saing, untuk mendukung tercapainya peningkatan koperasi yang sehat dan UKM yang produktif namun memiliki kualitas dalam pengolahan produknya.

- b. Dinas Perindagkop dan UKM melalui Bidang Industri melakukan pelatihan Kepada Pelaku IKM untuk menambah kemampuan kepada pelaku IKM, agar dapat menghasilkan produk yang lebih baik lagi, dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut maka akan dapat membantu pelaku IKM dalam menambah nilai produksi dan dengan meningkatnya produksi IKM akan menambah nilai tambah industri itu sendiri.
- c. Dinas Perindagkop dan UKM melalui Bidang Perdagangan Dalam Negeri dapat melaksanakan Kegiatan pengawasan Subsidi Ongkos Angkut kedaerah perbatasan Kalimantan Utara, Pasar Murah, dan pengawasan peredaran barang, pengawasan Sistem ongkos angkut tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran pengiriman barang pokok kebutuhan warga Kalimantan utara yang ada diperbatasan dan kegiatan pembangunan pasar rakyat di kecamatan tanjung palas hilir untuk menumbuhkan perekonomian didaerah tersebut dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu menunjang peningkatan PDRB sektor perdagangan di Kalimantan Utara.
- d. Dinas Perindagkop dan UKM melalui Bidang Perdagangan Luar Negeri melakukan Promosi Produk Lokal Kalimantan Utara Kepada Pasar Internasional dengan dikenalnya produk-produk pelaku usaha dikalimantan Utara akan meningkatkan nilai jual produk Kalimantan Utara di pasar internasional, yang mana akan menambah pendapatan dari pelaku itu sendiri serta secara tidak langsung meningkatkan nilai ekspor non migas di Kalimantan Utara, dan dapat mendukung peningkatan PDRB sektor perdagangan.

Kegagalan :

- a. Masih didapatnya pelaku IKM yang belum dapat memaksimalkan pengolahan Produk industri dari hulu hingga ke hilir dimana pengembangan dari inovasi akan produk yang dihasilkan Dinas Perindagkop dan UKM terkendala dengan alokasi dana yang terbatas dimana seharusnya dapat dilakukan pelatihan tentang inovasi teknologi terhadap pelaku IKM, dengan demikian kurang mendukung peningkatan nilai tambah sektor industri.
- b. Masih terdapat Koperasi yang belum dapat melakukan managerial koperasi dengan baik sehingga membuat koperasi tersebut tidak aktif atau bahkan dapat dibubarkan.

Solusi :

- a. Dinas Perindagkop dan UKM telah merencanakan dalam tahun anggaran 2019 akan membuat kegiatan pelatihan pengembangan sistem inovasi teknologi industri dalam membuat sebuah produk, yang dimana nanti dapat meningkatkan kualitas produk IKM dan dapat menambah nilai tambah industri di Kalimantan utara.
- b. Dinas Perindagkop dan UKM telah merencanakan dalam tahun anggaran 2020 akan meningkatkan pembinaan, pengawasan kepada koperasi di Provinsi Kalimantan Utara.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sampai dengan akhir Desember tahun 2019 Dinas Perindagkop dan UKM memiliki jumlah Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara didukung didukung oleh 3 Orang dengan Pendidikan S2, 47 Orang S1, 3 Orang D3, 4 Orang SLTA dan didukung oleh 9 Orang S1, 1 Orang D3, 11 Orang SMA Tenaga Kontrak.

Dalam efisiensi penggunaan sumberdaya manusia yang ada Dinas Perindagkop dan UKM menempatkan pegawai dengan beban kerja yang cukup

merata walaupun masih didapati beberapa jabatan yang belum sesuai dengan jabatannya.

Pada Tahun anggaran 2019 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menerima Pagu Anggaran sebesar Rp. 30.541.523.525,-, dan setelah dilakukan Perubahan Anggaran pada bulan Oktober 2019 Pagu anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menjadi Rp. 31.316.221.110,-

Belanja Langsung :

a. Sekretariat

Alokasi anggaran Rp. 4.439.976.425,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.253.140.997,- atau sebesar 95.79% dan sisa lebih pagu anggaran sebesar Rp 186.835.428,-

b. Perindustrian

Alokasi anggaran Rp. 4.455.151.808,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 4.340.364.883,- atau sebesar 97,42% dan sisa lebih pagu anggaran sebesar Rp. 114.786.925,-

c. Perdagangan Dalam Negeri

Alokasi anggaran Rp. 14.247.138.760,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.201.834.051,- Atau Sebesar 99.68% dan sisa lebih pagu anggaran sebesar Rp. 45.304.709,-

d. Perdagangan Luar Negeri

Alokasi anggaran Rp. 262.650.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 259.329.511,- atau sebesar 98.74% dan sisa lebih pagu anggaran sebesar Rp. 3.320.489,-

e. Koperasi dan UKM

Alokasi anggaran Rp. 3.453.420.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 3.401.819.595,- atau sebesar 98.51% dan sisa lebih pagu anggaran sebesar Rp. 22.026.651.453,- .

7. Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada tahun 2019, Program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM bertujuan untuk menunjang dari pada pencapaian perjanjian kinerja Kepala OPD seperti pada sajian tabel berikut;

Tabel 3.6 Analisa Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Anggaran dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran (2019)		Sasaran Strategis PK 2019	Indikat or Kinerja	Target	Pencap aian Target	Keterangan
1	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	493.395. 260	475.813. 209	Mening katnya perlindu ngan konsum en dan pengaw asan perdaga ngan terhadap produk beredar	Persen tase produ k/bara ng bereda r yang Tidak layak Konsu msi	40%	61.60%	Realisasi Program dan Kegiatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan 3 kegiatannya mendukung upaya pencapaian dalam menekan peredaran barang yang tidak layak konsumsi, Secara umum Pengawasan peredaran barang dan jasa dilakukan selama 3 bulan sekali di 5 kabupaten dan Kota Wilayah Kalimantan Utara. Objek Pengawasan
	Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	95.695.2 66	95.170.2 65					
	Penyelesaian permasalahan- permasalahan pengaduan konsumen	224.699. 995	218.024. 594					
	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan jasa	173.000. 000	162.618. 350					

								terdiri atas produk-produk penjualan pada Toko-toko distributor.
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil menengah	3.379.605.000	3.328.467.489	Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan UKM sehat	Persentase UKM Produktif	27%	33,00%	Pelaksanaan Program Pengembangan dan Keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dengan menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan yang mendukung untuk meningkatkan UKM yang produksi dan dengan adanya kegiatan pendampingan kepada koperasi melalui kegiatan pendampingan koperasi akan dapat menunjang pertumbuhan koperasi sehat dimana tugas dari pendampingan koperasi adalah memberikan bimbingan terhadap koperasi dan melaksanakan pelaporan dan manajemen keuangan koperasi
	Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	133.805.000	126.246.486					
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	2.992.800.000	2.959.614.153					
	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM*	253.000.000	242.606.850					

3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	73.815.000	73.352.106		Persentase Koperasi Sehat	18%	21.23%	Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan didukung dengan kegiatan Monev dan Pelaporan dimaksudkann untuk dapat memberikan pengawasan dan evaluasi kepada koperasi-koperasi yang belum menuntaskan kewajibanya dalam berkeoperasi, seperti sudah memenuhi aspek organisasi yang baik, aspek usaha yang baik, aspek keuangan yang baik, aspek sosial yang baik dan aspek SMD yang baik untuk dapat dikategorikan sebagai koperasi yang sehat
	Monitoring,Evaluasi dan pelaporan	73.815.000	73.352.106					
4	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	106.580.000	89.348.080	Meningkatnya Daya Saing Industri	Nilai Produksi IKM	900 M	900 M	Pada pelaksanaan Program dan Peningkatan Kemampuan

	Pembinaan kemampuan teknologi industri	106.580.000	89.348.080					Teknologi Industri dengan didukung oleh kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri memberikan pelatihan kepada Pelaku IKM untuk menambah kemampuan kepada pelaku IKM, agar dapat menghasilkan produk yang lebih baik lagi, dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut maka akan dapat membantu pelaku IKM dalam menambah nilai produksi dan dengan meningkatnya produksi IKM akan menambah nilai tambah industri.
5	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	4.348.571.808	4.251.016.803					Dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan inovasi dan kompetensi bagi pelaku IKM dalam mengembangkan dan
	Pembinaan dan Pengembangan bagi Pelaku Industri kecil dan Menengah	1.194.771.808	1.189.971.366		Persentase Peningkatan Kontribusi	2,70 %	0%	

	Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri*	3.153.800.000	3.061.045.437		busi Sektor Industri terhadap PDRB			mengelola usaha terhadap output usaha/produk yang dihasilkan oleh masing-masing IKM di masing-masing instansi di Kabupaten / Kota se Kaltara.
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	262.650.000	259.329.511	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Ekspor	2%	16.67%	Melalui Program peningkatan dan pengembangan ekspor dan kegiatan pemabangunan promosi perdagangan internasional dapat dilaksanakan, Promosi Produk Lokal Kalimantan Utara Kepada Pasar Internasional dengan dikenalnya produk-produk pelaku usaha dikalimantan utara akan meningkatkan nilai jual produk Kalimantan utara di pasar internasional, yang mana akan menambah pendapatan dari pelaku itu sendiri serta
	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	117.100.000	114.148.671					
	Pembangunan promosi perdagangan Internasional	145.550.000	145.180.840					

								secara tidak langsung meningkatkan nilai ekspor non migas di Kalimantan utara, dan dapat mendukung peningkatan PDRB sektor perdagangan.
7	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	493.395.260	475.813.209	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	2,5 %	0,00%	Pelaksanaan Program Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri dengan didukung 2 kegiatan pelaksanaan, dapat terselenggaranya pengawasan Produk beredar dikalimantan utara, pengawasan Sistem Ongkos Angkut (SOA) keperbatasan dan Kegiatan pasar murah untuk mendukung ketersediaan barang pada hari raya besar.
	Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk	95.695.266	95.170.265					
	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	224.699.995	218.024.594					
	Pembangunan Pasar Rakyat*	173.000.000	162.618.350					
	Kegiatan Pasar Murah*	493.395.260	475.813.209					

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, dan diperbarui melalui Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja.

Adapun dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 ini dibuat sebagai perjanjian kinerja Pimpinan SKPD kepada Kepala Daerah yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Diktum Ketiga tentang Penetapan Kinerja. Lakip Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing Kepala Bidang beserta struktural dibawahnya dan disetujui oleh Kepala Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah.

LAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 ini memberikan gambaran antara lain :

- Secara umum kinerja Dinas Perindagkop ditinjau dari pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2019 dapat dikategorikan cukup berhasil, walaupun ada beberapa indikator kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan, dan diperlukan kerja keras dan pemahaman yang lebih mendalam atas segala permasalahan dan tantangan yang ke depan semakin kompleks. Namun sebagian Keberhasilan ini juga tidak lepas dari kerja keras

seluruh aparat Disperindagkop & UKM Provinsi maupun Kab/Kota dalam salah satu upaya mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Utara.

Dengan laporan Lakip ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Pemerintahan yang akuntabel dan bertanggungjawab, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat terukur dan tepat sasaran dalam sebuah pelaksanaan Program dan Kegiatan.

B. Hasil Analisis Berupa Hambatan dari Bab III Sasaran

Hasil analisis hambatan yang disajikan pada Bab III akan disajikan kembali dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 Analisis Hambatan

No	Hambatan	Upaya yang dilakukan
1	2	3
1	Masih terdapat produk IKM yang belum memenuhi standarisasi produk sehingga masih kalah bersaing dalam penjualannya	Dialkukannya sosialisasi dan pelatihan tentang pengolahan produk menggunakan teknologi.
2	Masih banyaknya pelaku usaha yang belum berorientasi ekspor dan masih banyak pelaku usaha yang belum sadar akan pentingnya melindungi hak – hak konsumen	Dilakukan Sosialisasi kepada pelaku ekspor dan melakukan promosi terhadap produk lokal ke pasar internasional. Membentuk BPSK dan Melakukan pengawasan produk barang dan jasa beredar di Provinsi Kalimantan Utara.

3	Masih banyaknya pelaku ukm yang belum memahami mengenai manajemen keuangan sehingga mereka lebih rentan untuk mengalami kebangkrutan	Telah dilakukan pendampingan melalui kegiatan pendampingan koperasi dan UKM yang bersumber dari dana DAK Kementerian Koperasi dan UMKM
---	--	--

C. Langkah-langkah Yang Akan Dilakukan Di Tahun Berikutnya Untuk Mengatasi Hambatan

Untuk Mengatasi Hambatan yang terjadi maka akan dilakukan langkah-langkah berupa :

Tabel 4.2 Hambatan dan Upaya dilakukan tahun berikutnya

No	Sasaran Strategis	Hambatan	Upaya yang dilakukan ditahun berikutnya
1	2	3	4
1	Meningkatnya Daya Saing Industri	Masih terdapat IKM yang belum memenuhi standarisasi produk sehingga masih kalah bersaing dalam penjualanya	Akan dilakukan sosialisasi dan pelatihan tentang pengolahan produk menggunakan teknologi.
2	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan	Keterbatasan fasilitas penunjang perdagangan dalam	Pada tahun berikutnya akan diupayakann melakukan penyediaan fasilitas perdagangan seperti

	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	negeri,Masih banyaknya pelaku usaha yang belum berorientasi ekspor dan masih banyak pelaku usaha yang belum sadar akan pentingnya melindungi hak – hak konsumen	pembangunan pasar, layanan informasi perdagangan online, kemudian Akan dilakukan Sosialisasi kepada pelaku eskpor dan melakukan promosi terhadap produk lokal ke pasar internasional serta melakukan pengawasan terhadap produk barang dan jasa yang beredar dan untuk melindungi hak-hak konsumen di Provinsi Kalimantan Utara.
3	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	Masih banyaknya pelaku ukm yang belum memahami mengenai manajemen keuangan sehingga mereka lebih rentan untuk mengalami kebangkrutan, dan dalam perkembangan koperasi di wilayah Kalimantan utara masih didapati koperasi yang tidak aktif maupun koperasi yang aktif namun tidak melaksanakan kewajibanya dalam mengelola koperasi seperti RAT.	Akan dilakukan dan diteruskan melakukan pendampingan melalui kegiatan pendampingan koperasi dan UKM yang bersumber dari dana DAK Kementerian Koperasi dan UMKM

D. Pengungkapan Renstra Baru Dengan Menyusun Perjanjian Kinerja Baru Yang Sesuai Dengan Renstra

Dengan dilakukannya beberapa kali revisi yang diakomodir oleh bappeda maka Renstra Dinas Perindagkop dan UKM telah disesuaikan dan dilakukan revisi sesuai dengan ketentuan dalam penyusunan renstra, dengan berpedoman dengan Permendagri 86 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengndalian dan Evaluasi, dengan itu pula dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja 2019 yang telah disesuaikan dengan renstra terbaru Dinas Perindagkop dan UKM dengan indikator dan target sasaran yang lebih relevan dan dapat diukur;

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis PK 2019	Indikator Kinerja PK 2019	Target PK 2019
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
1	Meningkatkan Kontribusi sektor industri	Meningkatnya Daya Saing Industri	1. Nilai produksi IKM	Meningkatnya Daya Saing Industri	1. Nilai produksi IKM	900 Milyard
			2. Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		2. Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	2,7%
2	Meningkatkan Kontribusi sektor perdagangan	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan	1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan	1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	2,5%
			2. Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor		2. Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor	2%

		Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	40%
3	Meningkatkan pertumbuhan koperasi dan UKM berkualitas	Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan usaha kecil sehat	Persentase UKM Produktif		Persentase UKM Produktif	27%
			Persentase Koperasi Produktif		Persentase Koperasi Produktif	18%

Kepala Dinas,



Drs. Hartono, M.Si

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196105071985031014

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dasar pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Kalimantan Utara

Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara didukung oleh 3 Orang dengan Pendidikan S2, 47 Orang S1, 3 Orang D3, 4 Orang SLTA dan didukung oleh 8 Orang S1, 2 Orang D3, 11 Orang SMA Tenaga Kontrak.

A. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi

Dalam penentuan isu strategis perlu dilakukannya identifikasi terhadap permasalahan yang ada di Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara berikut permasalahan yang terdapat di bidang :

a. Permasalahan bidang Perindustrian

- Ketatnya tingkat persaingan pasar.
- Tingginya cost Produksi.
- Masih rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk.
- Produk-produk yang diproduksi oleh pelaku usaha Kalimantan Utara tidak cukup baik untuk bersaing di pasaran nasional maupun internasional.
- Masih rendahnya kompetensi pelaku IKM.
- Belum terpromosikannya produk IKM dengan baik.
- Perizinan (sertifikasi) yang terlalu panjang dan cukup lama dan berpengaruh pada produktifitas Pelaku IKM.

b. Permasalahan bidang Perdagangan

Beberapa permasalahan terkait dengan urusan perdagangan antara lain adalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan Luar Negeri
- Minimnya pengetahuan pelaku usaha dalam peningkatan dan pengembangan produk-produknya dan mekanisme dalam melakukan kegiatan ekspor/impor.
- Kesadaran pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk masih tergolong rendah.
- Jaringan distribusi yang sulit dikarenakan minimnya infrastruktur penunjang sehingga meningkatkan cost produk-produk yang digunakan di daerah Kalimantan Utara sendiri maupun produk yang ditawarkan ke pasar nasional maupun internasional.
- Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melindungi hak-hak konsumen.
- Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan.
- Belum terpromosikannya produk pelaku usaha dengan baik.

c. Permasalahan Bidang Koperasi dan UKM

Beberapa permasalahan yang terkait dengan urusan Koperasi dan UKM antara lain adalah sebagai berikut :

- Rendahnya tingkat kemampuan SDM dalam mengelola koperasi.
- Meningkatnya koperasi tidak aktif.
- Masih rendahnya kompetensi pelaku UKM dan UMKM.
- Rendahnya tingkat kewirausahaan pengelola UKM.
- Fasilitas untuk promosi produk UKM sangat terbatas.
- Pemahaman yang masih kurang untuk (Manajerial) pengetahuan aliran keuangan usaha yang menunjang perhitungan laba dan rugi usaha UKM.
- Lemahnya strategi untuk mencapai kesuksesan sebuah UKM/Koperasi.
- Sulitnya pemasaran produk UKM.

Selain permasalahan yang terdapat dibidang, terdapat juga permasalahan lain sebagai berikut :

- Kurang memadainya Sumber Daya Manusia pegawai dari segi kualitas maupun kuantitas.
- Kurang memadainya sarana/prasarana penunjang.
- Perjanjian Kinerja Merupakan Perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak dimana pihak pertama adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dan Pihak ke dua adalah Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Ir. Irianto Lambrie, M.M sebagai acuan kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM pada tahun anggaran 2019 dan mempertanggungjawabkan dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Table Perjanjian Kinerja dan target

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Daya Saing Industri	1. Nilai Produksi IKM	900 M
		2. Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	2,7%
2	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	2,5%
		Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor	2%
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	40%
3	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	1. Persentase UKM Produktif	27%
		2. Persentase Koperasi Sehat	18%

B. Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian – capaian di perjanjian kinerja

Capaian indikator pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan UKM tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai produksi IKM.
2. Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB.
3. Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.
4. Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor.
5. Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi.
6. Persentase UKM Produktif.
7. Persentase Koperasi Sehat.

***Tabel 3.1 Capaian Kinerja Berdasarkan IKU Disperindagkop dan
UKM Tahun 2019***

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya daya saing industri	Nilai Produksi IKM	900 M	900 M
		Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	2,7%	0%
2.	Meningkatnya Daya saing Perdagangan	Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	2,5%	0%
		Persentase pertumbuhan pelaku ekspor	2%	16,67%

	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang Tidak layak Konsumsi	40%	61.60%
3.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	Persentase UKM Produktif	27%	33%
		Persentase Koperasi Sehat	18%	97 Koperasi 21.23%

Catatan :

- 1 Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB dan Persentase Peningkatan Sektor Perdagangan terhadap PDRB masih 0% karena untuk data 2019 belum dirilis oleh BPS.
- 2 Jumlah Pelaku Ekspor pada tahun 2018 sebanyak 30 Pelaku Ekspor, pada tahun 2019 meningkat menjadi 35 Pelaku Ekspor.
- 3 97 Koperasi dari 457 koperasi aktif sekaltara yang telah memiliki NIK dan sertifikat NIK Koperasi yang telah diterbitkan oleh Kementrian Koperasi dan UKM tahun 2019
- 4 Jumlah UMKM pada tahun 2019 sebanyak 12.506 UMKM
- 5 Sumber Data : Masing – Masing Bidang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara.

C. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, dan diperbarui melalui Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja.

Adapun dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 ini dibuat sebagai perjanjian kinerja Pimpinan SKPD kepada Kepala Daerah yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Diktum Ketiga tentang Penetapan Kinerja. Lakip Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017 telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing Kepala Bidang beserta struktural dibawahnya dan disetujui oleh Kepala Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah.

Secara umum kinerja Dinas Perindagkop & UKM ditinjau dari pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaan Tahun 2019 dapat dikategorikan cukup berhasil, walaupun ada beberapa indikator kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan, dan diperlukan kerja keras dan pemahaman yang lebih mendalam atas segala permasalahan dan tantangan yang ke depan semakin komplek. Namun sebagian keberhasilan ini juga tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat Disperindagkop & UKM Provinsi maupun Kab/Kota dalam salah satu upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Utara.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
TAHUN 2020**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI DATA	TARGET	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan kontribusi sektor industri	Meningkatnya Daya Saing Industri	Nilai Produksi IKM	<i>Nilai Produksi IKM Tahun N</i>	947 M	Dinas Perindagkop dan UKM	Bidang Industri
			Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	<i>Persentase PDRB urusan Indutri tahun N – Persentase PDRB urusan Industri tahun N – 1</i>	2,9%	Dinas Perindagkop dan UKM	
2	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan	Persentase peningkatan Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB	<i>Persentase PDRB urusan perdagangan tahun N – Persentase PDRB urusan perdagangan tahun N – 1</i>	<u>2,5%</u>	Dinas Perindagkop dan UKM	Bidang Perdagangan dalam dan Luar Negeri
			Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor	$\frac{\text{Jumlah Pelaku usaha ekspor tahun } n - \text{Jumlah Pelaku usaha Tahun } n-1}{\text{Jumlah Pelaku Usaha Ekspor Tahun } N} \times 100\%$	<u>2%</u>	Dinas Perindagkop dan UKM	
		Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang tidak layak konsumsi	$\frac{\text{Jumlah produk yang tidak layak konsumsi yang diawasi}}{\text{Jumlah barang beredar yang diawasi}} \times 100\%$	27%	Dinas Perindagkop dan UKM	
3	Meningkatkan pertumbuhan Koperasi dan UKM berkualitas	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	Persentase UKM produktif	$\frac{\text{Jumlah UKM yang Produktif}}{\text{Jumlah UKM}} \times 100\%$	30%	Dinas Perindagkop dan UKM	Bidang Koperasi dan UKM
			Persentase Koperasi sehat	$\frac{\text{Jumlah koperasi sehat}}{\text{Jumlah Koperasi}} \times 100\%$	25%	Dinas Perindagkop dan UKM	

KEPALA DINAS,



Drs. Hartono, M.Si
NIP. 196105071985031014

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2020**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
2	3	4	5
Meningkatnya Daya Saing Industri	Nilai Produksi IKM	Milyar Rupiah	947
	Persentase peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persentase	2,9
Meningkatnya Daya Saing Perdagangan	Persentase peningkatan Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase	2,5
	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor	Persentase	2
Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar	Persentase produk/barang beredar yang tidak layak konsumsi	Persentase	27

Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Sehat	Persentase UKM Produktif	Persentase	30
	Persentase Koperasi Sehat	Persentase	25

Kepala Dinas,

Drs. Hartono, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196105071985031014